



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
2017-2022**

BADAN PENGHUBUNG

**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan visi dan misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyusun Renstra (Rencana Strategik) sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatannya yang berisi visi, misi, tujuan dan sasarannya.

Pada akhirnya, Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 12 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

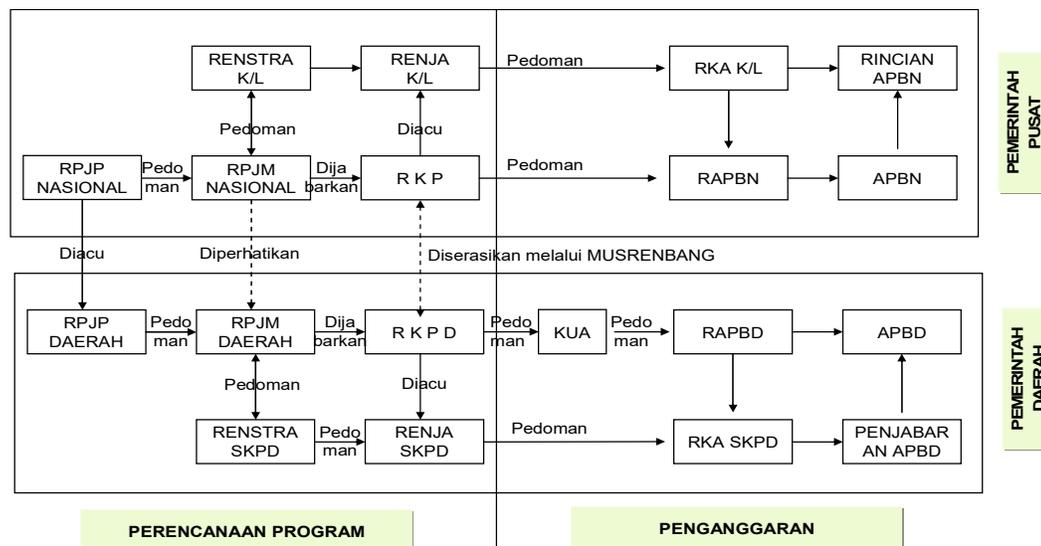
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar I.1

Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya



1.1. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun **maksud** Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Untuk pengelolaan keberhasilan Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif;
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap pemerintah dan masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat;
4. Untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan Renstra

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah untuk difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja OPD dan berbagai kebijakan dalam lingkup tugasnya dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu tujuan dari penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Rancangan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Dari tujuan Renstra

pada umumnya yang tertulis di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Penghubung untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017-2022.

Adapun alur pemikiran yang termaktub dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Restra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Gubernur yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Renstra SKPD. Visi dan Misi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (OPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra Badan Penghubung dan Renja Badan Penghubung, maka dokumen Renja Badan Penghubung Povinsi Kepulauan Bangka Belitung haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti isu strategis, visi, misi, strategi kebijakan maupun tujuan dan sasarannya. Sedangkan program Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung haruslah mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab I berupa uraian yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kedudukan renstra SKPD dalam perencanaan daerah dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Bab II berisi tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan kantor, sumber-sumber pembiayaan dan analisa lingkungan strategis, isu dan permasalahan strategis yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

BAB III : Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017-2022, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta .

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bab ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017-2022.

BAB VI : Indikator Kinerja Badan Penghubung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Penutup

Pada bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan program-program dalam rencana strategis dan partisipasi, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam menyiapkan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Penghubung.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung, namun Undang-Undang ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi dalam kaitannya dengan perumusan.

Badan Penghubung atau dikenal juga sebagai Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Penghubung di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 12 Januari 2003, yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Kemudian Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 9 Desember 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Tata kerja pada Badan Daerah.

- a. Badan Penghubung merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pelayanan dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :
 1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
4. Seksi Promosi dan Informasi ;
5. Seksi Humas dan Protokol .

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 18 Tahun 2016 uraian tugas pokok dan fungsi dari Badan Penghubung, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, memvalidasi, mempromosi, membina, mengendalikan, menyelenggarakan dan menetapkan seluruh kegiatan kesekretariatan,

bidang dan kelompok jabatan fungsional dan penunjang urusan pembantuan Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan memvalidasi bahan penyusunan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Memvalidasi kebijakan teknis bidang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- c. Mengkoordinasikan administrasi pemerintahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat;
- e. Mengkoordinasikan dan menjalankan protokoler dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga internasional;
- f. Mengkoordinasikan fasilitas pembinaan masyarakat kepulauan Bangka Belitung di Jabodetabek dan luar daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelayanan promosi dan informasi, akomodasi serta transportasi bagi pejabat dan aparat dari daerah;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan promosi ASN;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan. Sedang uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Menyusun perencanaan program kerja Badan Penghubung Provinsi;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- d. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- e. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- f. Mengkaji bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan dan pelaporan ;
- i. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- k. Merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Melaksanakan pembinaan ASN;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis hubungan antar lembaga. Sedangkan uraian tugas dan fungsinya adalah :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Bangka Belitung;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga baik antar lembaga pemerintah, swasta maupun domestik untuk kelancaran hubungan kerja;
- c. Menyiapkan pedoman yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kegiatan hubungan antar lembaga;
- e. Membuat rencana dan program kerja seksi hubungan antara lembaga
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan ;

- g. Melaksanakan administrasi seksi hubungan antara lembaga;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Seksi Promosi dan Informasi

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijaksanaan perumusan kebijakan teknis Promosi dan Informasi. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan promosi dan informasi;
- b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan informasi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan bidang Promosi dan informasi;
- d. Mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seni, budaya, pariwisata, promosi dan informasi anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan promosi dan informasi pembangunan Bangka Belitung;
- f. Melaksanakan administrasi seksi promosi dan informasi;
- g. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
- h. Melaksanakan pembinaan staf;
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Humas dan Protokol

Seksi Humas dan Protokol mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kehumasan

dan layanan protokol. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsinya adalah :

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis kehumasan dan layanan keprotokolan;
- b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Humas dan Protokol ;
- c. Membuat konsep dan mengembangkan kerjasama dengan media massa sebagai upaya penyebarluasan informasi, serta penyusunan data yang diperlukan pemerintah Provinsi ;
- d. Melaksanakan pengolahan dokumentasi kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi selama bertugas di DKI Jakarta dan sekitarnya
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya;
- f. Menyiapkan bahan dan penataan pada acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya;
- g. Menyiapkan bahan akomodasi bagi para pejabat yang melaksanakan tugas kedinasan ;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana transportasi bagi para pejabat yang melaksanakan tugas kedinasan;
- i. Merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- j. Melaksanakan pembinaan ASN;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Sumber Daya Badan Penghubung

Badan Penghubung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sampai pertengahan tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 61 (enam puluh satu) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 33 (tiga puluh tiga) orang tenaga PHL, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tingkat I (III/d)	0
4	Penata (III/c)	7
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7
6	Penata Muda (III/a)	4
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
8	Pengatur (II/c)	2
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3
10	Pengatur Muda (II/a)	0
11	Juru Tingkat I (I/d)	0
12	Juru (I/c)	0
13	Juru Muda Tk I (I/b)	0
14	Juru Muda (I/a)	0
15	Pegawai Harian Lepas (PHL)	33
J U M L A H		61

Tabel 2. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	S2 – Magister	7
2	S1 – Sarjana	12
3	D3	3
4	S M A	6
5	S M P	0
6	S D	0
J U M L A H		28

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya dibidang pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi dengan sumber daya / sarana prasarana yang terdiri dari:

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	13 Unit
2	Kendaraan roda 2	4 Unit
3	Komputer yang dapat digunakan	12 Unit
4	Laptop yang dapat digunakan	8 Unit
5	iPad	2 Unit
6	AC yang dapat digunakan	23 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG

- a. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakili Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah di Jakarta;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek;
- d. Memberikan pelayanan kepada Pejabat, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan penyampaian informasi potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Provinsi Kepulauan sebagai **“Show Window “** ;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Daerah Bangka Belitung ;
- h. Memfasilitasi pembinaan sanggar seni budaya daerah Bangka Belitung di Jabodetabek.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari Badan Penghubung adalah :

- a. Banyaknya beban tugas pelayanan kedinasan dan keprotokoleran yang di laksanakan;
- b. Adanya rencana kenaikan eselonering pada Badan Penghubung;
- c. Wilayah tugas juga akan bertambah seiring dengan rencana pembangunan mess mahasiswa di Palembang (Inderalaya), Jakarta / Depok, dan Yogyakarta

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada				
					Tahun					ke-					Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan SDM Badan Penghubung		100		100	100	100	100	100	85	86	89	91	91	85	86	89	91	91
2	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap kinerja SDM Badan Penghubung		100		100	100	100	100	100	90	95	97	98	98	90	95	97	98	98
3	Prosentase unsur Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan & Kinerja SDM		100		100	100	100	100	100	83	85	90	92	93	83	85	90	92	93
4	Prosentase Unsu yang puas atas pelayanan fasilitasi yang diberikan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase pengunjung yang puas atas pameran		100		100	100	100	100	100	80	81	85	96	96	80	81	85	96	96
6	Prosentase kepuasan pengunjung pentas seni budaya Bangka Belitung Jakarta		100		100	100	100	100	100	85	94	95	97	100	85	94	95	97	97
7	Prosentase kepuasan pengisi acara pentas seni yang di fasilitasi di Jakarta		100		100	100	100	100	100	82	87	89	94	100	82	87	89	94	94
8	Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta		100		25	25	25	25	25	11	10	12	15	23	44	40	48	60	92

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.220.002.592	4.475.002.000	6.840.100.000	5.770.600.000	6.023.200.000	3.178.290.824	4.435.280.583	6.702.469.901	5.711.596.051	5.917.909.444	98.70	99.11	97.99	98.98	98.25	5.265.780.918	5.189.109.360
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	714.400.000	-	-	-	-	713.679.440	-	-	-	-	99.90	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	50.000.000	74.000.000	50.000.000	76.800.000	-	49.940.000	72.335.550	45.028.950	57.866.500	-	99.88	97.75	90.06	75.35	62.700.000	56.292.750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.637.968.000	2.159.000.000	1.616.900.000	2.220.634.000	1.841.750.000	1.622.308.706	2.151.863.665	1.615.297.000	2.189.704.940	1.823.145.288	99.04	99.67	99.90	98.61	98.99	1.895.250.400	1.880.463.919
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.647.632.000	5.496.000.000	6.209.100.000	5.984.766.000	9.658.250.000	5.645.787.555	5.488.829.840	6.194.289.300	5.982.588.440	9.645.973.725	99.97	99.87	99.76	99.96	99.87	4.860.663.600	6.591.493.772

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di jantung kota, sangat strategis sebagai terminal penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kantor-kantor pusat pemerintahan dan kantor-kantor perwakilan negara asing serta pusat perdagangan yang ada di Jakarta.

Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai baik gedung, kendaraan operasional, mess, sumber daya manusia dan biaya sudah sepatutnya. Badan Penghubung dapat menjalankan roda organisasi secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntabel dalam tugas-tugas pelayanan.

Selain itu Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta juga mengelola anjungan daerah yang ada di Taman Mini “Indonesia Indah”, dimana keberadaan Anjungan Daerah di Taman Mini “Indonesia Indah” Jakarta, disamping secara wujud fisiknya merupakan replika sebagian kekayaan budaya daerah, terutama dalam bentuk arsitektur bangunan rumah-rumah adat beserta perabot-perabot khasnya, tetapi secara aktivitas diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam ikut mengenalkan, menyebarluaskan dan mempromosikan potensi daerah, khususnya kerajinan, industri kecil, obyek-obyek wisata dan seni budaya daerah.

Sebagai tempat rekreasi yang murah dan ramai pengunjung baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing, terutama pada bulan-bulan tertentu didukung dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya, maka Taman Mini “Indonesia Indah” termasuk didalamnya adalah Anjungan Daerah masih cukup efektif sebagai “ *Show Window* “ berbagai potensi daerah melalui pameran, promosi dan pertunjukan seni budaya daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai fasilitator, regulator dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai satuan kerja perangkat daerah harus mampu berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan kondisi sekarang ini dan kondisi yang direncanakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan serta sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana terencana dalam Renstra tersebut dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Hubungan Antar Lembaga

- 1) Belum optimalnya pengelolaan, pengkoordinasian dan pembinaan hubungan antar lembaga
- 2) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dan masyarakat.
- 3) Masih belum memadainya SDM yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga dan masyarakat
- 4) Keterbatasan kemampuan *up date* data yang tersedia guna kelancaran hubungan antar lembaga
- 5) Masih kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama

2. Promosi dan Informasi

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan Promosi dan Informasi
- 2) Masih belum memadainya SDM yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan Promosi dan Informasi
- 3) Adanya berbagai perubahan dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan Promosi dan Informasi

- 4) Belum optimalnya kegiatan promosi produk unggulan, wisata maupun keragaman seni dan budaya daerah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 5) Masih lemahnya apresiasi masyarakat daerah terhadap kecintaan produk, budaya maupun pariwisata yang dimiliki
- 6) Belum efisiennya penggunaan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan promosi, informasi dan investasi.

3. Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1) Terjadinya berbagai perubahan stabilitas nasional dan ekonomi yang mempengaruhi kegiatan anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai sarana pelestarian promosi budaya dan sumber PAD
- 2) Adanya berbagai perubahan dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi kegiatan di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat seni budaya Bangka Belitung
- 3) Masih belum optimalnya pelaksanaan hubungan dengan pihak-pihak terkait yang akan memanfaatkan anjungan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 4) Keterbatasan SDM secara kualitas.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat apresiasi seni budaya, promosi produk-produk kerajinan, kebudayaan dan pariwisata.
- 6) Belum optimalnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Anjungan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Humas dan Protokol / Pelayanan

- 1) Masih adanya berbagai perubahan dilapangan yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan
- 2) Belum optimalnya informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pelayanan
- 3) Masih belum memadainya SDM yang tersedia untuk melaksanakan fungsi pelayanan
- 4) Belum optimalnya fungsi pelayanan teknis transportasi dan akomodasi dalam mendukung kelancaran tugas
- 5) Kurang tersosialisasinya standar serta pedoman teknis dalam pelayanan pejabat daerah yang bertugas di Jakarta

Sebagai unsur pendukung Gubernur, potret Badan Penghubung berdasarkan analisa *SWOT* ada beberapa permasalahan yakni Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman/Tantangan (*Threats*) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas operasional dan anjungan;
- c. Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan disertai dukungan kelembagaan yang kuat pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
- d. Tersedianya Sumber Daya Aparatur;
- e. Keberadaan kantor yang strategis/aksesibilitas mudah dijangkau.

Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Bidang urusan dan pekerjaan yang multidimensional dan lebih bersifat pelayanan / fasilitator;
- b. Bidang informasi dan investasi belum didukung dengan bahan-bahan, promosi dan investasi secara memadai;
- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan pemberian informasi, promosi dan investasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Masih kurangnya keahlian sumber daya aparatur;
- e. Bangunan gedung kantor yang belum representif dan belum memadai

Peluang (*Opportunities*)

- a. Semakin tingginya masyarakat Bangka Belitung yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan;
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan menginformasikan serta mempromosikan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang para investor untuk berinvestasi;

- c. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan berbelanja;
- d. Keberadaan forum paguyuban masyarakat Bangka Belitung Se-Jabodetabek
- e. Adanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.

Tantangan / Ancaman (*Threats*)

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja Institusi Pemerintah yang semakin tinggi;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi;
- c. Persaingan di segala bidang usaha, promosi, dan investasi yang semakin ketat;
- d. Warga Bangka Belitung Se-Jabodetabek belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai “*Show Window*” Budaya Bangka Belitung;
- e. Adanya hambatan koordinasi dan jejaringan dalam rangka menginformasikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya dalam rangka meraih peluang investasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

Visi :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.

2. Sejahtera menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.

3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).

4. Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.

5. Teknologi dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehatan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana

b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, prioritas dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang termuat di dalam RPJMD 2017-2022, maka pelayanan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja daerah diarahkan untuk mendukung **misi ke-5**, yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”**.

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Badan Penghubung Provinsi adalah:

“Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.”

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : " Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yan Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi : Bidang Pelayanan Publik, menghadirkan pelayanan publik yang serba hadir dan efisien sehingga dapat menjangkau masyarakat Babel secara keseluruhan melalui pemanfaatan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Semakin tingginya kunjungan pejabat pemerintahan ke Jakarta, tuntutan pelayanan yang semakin tinggi. ➢ Adanya kekurangan SDM yang dengan kemampuan yang memadai dan berkualitas sementara jumlah SDM yang ada terlalu banyak 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah sarana prasarana yang ada sangat terbatas dan belum representatif dan memadai ➢ Keterbatasan penguasaan <i>skill</i> pada bagain tertentu terhadap SDM yang di Badan Penghubung 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya keinginan dari pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih representatif ➢ Tersedianya SDM pada Badan Penghubung
	Misi : Bidang Reformasi Birokrasi, memastikan birokrat sebagai aparatur profesional dan berinisiatif tinggi sehingga, lebih responsif dalam menjawab kebutuhan publik dan tantangan masa depan melalui mekanisme <i>reward and punishment</i> yang jelas			
	Program : Peningkatan Pelayanan Pemerintah			

2.	Misi : Bidang Pariwisata, menyeimbangkan pembangunan pariwisata antara Bangka Belitung dengan dukungan konektivitas antar pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah ➤ Kurangnya promosi seni budaya Bangka Belitung di Jakarta ➤ Dibidang promosi belum didukung dengan bahan-bahan promosi secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari Pemerintah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya kemasan materi seni budaya yang dibawa dari daerah ➤ Kurangnya materi promosi seni budaya ➤ Kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pembuatan promosi untuk produk daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya generasi muda yang peduli dengan kesenian daerah ➤ Dukungan dana untuk pembuatan sarana prasarana promosi
	Program : Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi			

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN /LEMBAGA YANG SEJENIS

Bahwa dalam hal ini Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tidak ada keterkaitan dengan target capaian program pemerintah pusat yang perlu didukung.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan yang signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang didalamnya termasuk mengelola Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMII dengan memperhatikan isu-isu strategis antara lain :

Isu Strategis : ” ***Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan Pelayanan publik*** ” dan “ ***Mengembangkan koordinasi dan jejaringan dengan stake holder guna meningkatkan kerjasama dalam promosi dan informasi*** ” sebagaimana salah satu misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RPJMD 2017 -2022 yakni ” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik ”, hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta :

- a. Bertanggung jawab secara teknis dalam bidang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Bangka Belitung di Jakarta
- b. Bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
- d. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakili Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta;
- e. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah di Jakarta;
- f. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek;
- g. Memberikan pelayanan kepada Pejabat, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta;
- h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pameran, promosi dan penyampaian informasi potensi Bangka Belitung;
- i. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai “ **Show Window** “ Bangka Belitung;
- j. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Bangka Belitung ;
- k. Memfasilitas pembinaan sanggar seni budaya Bangka Belitung di Jabodetabek

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut Badan Penghubung terkait langsung dengan pelaksanaan Misi 5 yaitu : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dalam operasionalisasi rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sebagai alat ukur untuk tercapainya hasil yang ingin diwujudkan tersebut.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang di hadapi, telaah terhadap Visi Misi Gubernur serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup strategis, maka Isu-isu Strategis dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu mendapat perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Belum optimalnya pengelolaan, pengkoordinasian dan pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan promosi dan informasi serta investasi
3. Adanya berbagai perubahan dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan promosi dan investasi.
4. Belum optimal kegiatan promosi produk unggulan, wisata, maupun keseragaman seni dan budaya daerah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Masih lemahnya apresiasi masyarakat daerah terhadap kecintaan produk budaya maupun pariwisata yang dimiliki.
6. Belum optimalnya dan efisiensinya penggunaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat promosi dan sumber PAD.
7. Belum efisiennya penggunaan sarana dan prasarana yang ada, guna mengoptimalkan promosi, informasi dan investasi.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi RPJMD

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi terkait dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 terpilih adalah :

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi ”

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

- 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani pemerintah.
- 2. Sejahtera**, menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
- 3 Maju**, adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berfikir jauh kedepan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 4 Unggul**, dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan bahari dengan dukungan semua faktor.
- 5 Teknologi**, dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga suatu yang harus diemban atau dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan; Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan diatas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Badan Penghubung Provinsi secara khusus mendukung **misi ke-5** yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”**.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang harus diselesaikan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut **Tujuan** Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Belitung di Jakarta adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya pelayanan publik yang baik pada Badan Penghubung”**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **Sasaran** yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta adalah sebagai berikut **Meningkatkan Pelayanan Publik Badan Penghubung.**

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE.				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya reformasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan profesional	1. Prosentase kelancaran dan terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran serta tersedianya sarana prasarana aparatur	100	100	100	100	100
				2. Prosentase unsur pemerintahan dan masyarakat yang puas terhadap pelayanan serta kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung	100	100	100	100	100

			2. Tersedianya bahan dan materi untuk informasi, promosi, sarana prasarana yang representatif bagi tugas pelayanan kedinasan, pendampingan keprotokolan dan hubungan antar lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan administrasi dan informasi	100	100	100	100	100
				2. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan keprotokolan	100	100	100	100	100

1.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Strategi di susun secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan. Strategi pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di Badan Penghubung. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun sebelum menentukan Strategi dan kebijakan perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dulu

Sebagai unsur pendukung Gubernur, potret Badan Penghubung berdasarkan analisa *SWOT* ada beberapa permasalahan yakni Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman/Tantangan (*Threats*) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas operasional dan anjungan daerah di TMII;
- c. Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan disertai dukungan kelembagaan yang kuat pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
- d. Tersedianya Sumber Daya Aparatur;
- e. Keberadaan kantor yang strategis/aksesibilitas mudah dijangkau.

Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Bidang urusan dan pekerjaan yang multidimensional dan lebih bersifat pelayanan / fasilitator;
- b. Bidang informasi dan investasi belum terdukung dengan bahan-bahan, promosi dan informasi secara memadai;
- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan pemberian promosi dan informasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Masih kurangnya keahlian sumber daya aparatur;
- e. Bangunan gedung kantor yang belum representif dan belum memadai

Peluang (*Opportunities*)

- a. Semakin tingginya masyarakat Bangka Belitung yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan;
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan menginformasikan serta mempromosikan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang para investor untuk berinvestasi;
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan berbelanja;
- d. Keberadaan forum paguyuban masyarakat Bangka Belitung Se-Jabodetabek
- e. Adanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.

Tantangan / Ancaman (*Threats*)

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja Institusi Pemerintah yang semakin tinggi;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi;
- c. Persaingan di segala bidang usaha, promosi, dan investasi yang semakin ketat;
- d. Warga Bangka Belitung Se-Jabodetabek belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai “*Show Window*” Budaya Bangka Belitung;

- e. Adanya hambatan koordinasi dan jejaringan dalam rangka menginformasikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya dalam rangka meraih peluang investasi.

TABEL I
Analisa Lingkungan Internal

NO.	KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)	NO.	KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)
1.	Adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah;	1.	Bidang urusan dan pekerjaan yang multi dimensional dan lebih bersifat pelayanan / fasilitator;
2.	Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas operasional, anjungan daerah di TMI;	2.	Bidang informasi dan investasi belum didukung dengan bahan-bahan promosi dan informasi secara memadai;
3.	Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan disertai kelembagaan yang kuat pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;	3.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan pemberian promosi dan informasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4.	Tersedianya sumber daya aparatur;	4.	Masih kurangnya keahlian sumber daya aparatur;
5.	Keberadaan kantor yang strategis / aksesibilitas mudah di jangkau.	5.	Bangunan gedung kantor yang belum representatif dan belum memadai.

Adapun analisis SWOT berdasarkan lingkungan eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*)

1. Semakin tingginya masyarakat Bangka Belitung yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai macam urusan dan kegiatan
2. Banyaknya kegiatan / event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan menginformasikan serta mempromosikan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang para investor untuk berinvestasi
3. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan berbelanja
4. Keberadaan forum paguyuban masyarakat Bangka Belitung Se- Jabodetabek
5. Adanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.

Tantangan / Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja institusi pemerintah yang semakin tinggi
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi
3. Persaingan di segala bidang usaha, promosi dan informasi yang semakin ketat

4. Warga Bangka Belitung Se-Jabodetabek belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai *show window* budaya Bangka Belitung.
5. Adanya hambatan koordinasi dan jaringan dalam rangka menginformasikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya dalam rangka meraih peluang investasi.

TABEL II
Analisa Lingkungan Eksternal

No.	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	No.	TANTANGAN / ANCAMAN (<i>THREATS</i>)
1.	Semakin tingginya masyarakat Bangka Belitung yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai macam urusan dan kegiatan	1.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja institusi pemerintah yang semakin tinggi
2.	Banyaknya kegiatan / event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan menginformasikan serta mempromosikan potensi daerah Bangka Belitung sehingga untuk menarik peluang berinvestasi	2.	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan berbelanja	3.	Persaingan di segala bidang usaha, promosi dan investasi yang semakin ketat
4.	Keberadaan forum paguyuban masyarakat Bangka Belitung se- Jabodetabek	4.	Warga Bangka Belitung Se-Jabodetabek belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai <i>show window</i> Budaya Bangka Belitung
5.	Adanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak	5.	Adanya hambatan koordinasi dan jejaringan dalam rangka menginformasikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya dalam rangka meraih peluang investasi

Dari hasil analisa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat dipetakan sebagai berikut :

Faktor Internal	<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Gubernur No.59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah 2. Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas operasional, anjungan daerah di TMII 3. Dukungan kelembagaan yang kuat pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta 4. Tersedianya sumber daya aparatur 5. Keberadaan kantor yang strategis / aksesibilitas mudah di jangkau 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang urusan dan pekerjaan yang multi dimensional dan bersifat pelayanan / fasilitator 2. Bidang informasi dan investasi belum terdukung dgn bahan-bahan promosi dan informasi secara memadai 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan pemberian informasi, promosi dan investasi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Masih kurangnya keahlian sumber daya aparatur 5. Bangunan gedung kantor yang belum representatif dan belum memadai
Faktor Eksternal		

	Alternatif Strategi SD :	Alternatif Strategi ST :
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya masyarakat Bangka Belitung yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai macam urusan dan kegiatan 2. Banyaknya kegiatan / event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan menginformasikan serta mempromosikan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang investor untuk berinvestasi 3. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan berbelanja 4. Keberadaan forum paguyuban masyarakat Bangka Belitung se- Jabodetabek 5. Adanya tawaran kerjasama dari berbagai pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penerapan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> 2. Optimalisasi biaya yang ada, memperbanyak bahan dan materi informasi, promosi dan investasi daerah Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Meningkatkan kegiatan mengikuti event promosi di Jakarta dalam rangka untuk lebih mengenalkan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang investor untuk berinvestasi
	Alternatif Strategi WD :	Alternatif Strategi WT :
<p>Tantangan /Ancaman (<i>Threats</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja institusi pemerintah yang semakin tinggi. 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi 3. Persaingan di segala bidang usaha, promosi dan investsai yang semakin ketat 4. Warga Bangka Belitung Se-Jabodetabek belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan anjungan TMII sebagai <i>show window</i> Budaya Bangka Beltung 5. Adanya hambatan koordinasi dan jejaringan dalam rangka menginformasikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya dalam rangka meraih peluang investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan kegiatan mengikuti event promosi di Jakarta dalam rangka untuk lebih mengenalkan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang investor untuk berinvestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan. 2. Mengintensifkan diklat dan penyebaran seni budaya Bangka Belitung untuk mengangkat citra dan eksistensi Bangka Belitung dan seniman Bangka Belitung dalam percaturan global.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Badan Penghubung, maka **Strategi dan Kebijakan** yang dicanangkan adalah :

Strategi :

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk peningkatan kapasitas, dedikasi, loyalitas dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Penetapan dan penerapan *Standart Operational Procedure (SOP)* pelayanan;

- c. Optimalisasi biaya dan sarana yang ada, memperbanyak bahan dan materi informasi, promosi dan investasi daerah Bangka Belitung;
- d. Menjalin kerjasama dan koordinasi dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Bangka Belitung Se-Jabodetabek, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pihak swasta untuk mewujudkan Badan Penghubung dan anjungan daerah Bangka Belitung di TMII sebagai *show window* budaya daerah Bangka Belitung;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- f. Meningkatkan kegiatan untuk mengikuti event promosi di Jakarta dalam rangka untuk lebih mengenalkan potensi daerah Bangka Belitung sehingga dapat menarik peluang insvestor untuk berinvestasi;
- g. Membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Peningkatan pelayanan administrasi, informasi, keprotokolan, transportasi, sarana dan prasarana kepada pejabat/perangkat daerah/pimpinan dan anggota DPRD dan masyarakat dilakukan secara selektif dan memperhitungkan kemampuan daya dukung fasilitas yang ada;
- c. Peningkatan bahan promosi dan informasi daerah Bangka Belitung dan kelengkapan barang-barang seni dan budaya daerah Bangka Belitung;
- d. Peningkatan kegiatan yang mendukung terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah swasta untuk mewujudkan Badan Penghubung dan anjungan daerah Bangka Belitung di TMII sebagai *show window* budaya Bangka Belitung.

- e. Dalam hal pelayanan keprotokolan kepada Pejabat/Perangkat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara selektif dan memperhitungkan kemampuan daya dukung fasilitas yang ada.

Table. 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi "			
MISI : 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya pelayanan publik yang baik pada Badan Penghubung	l. Meningkatkan Pelayanan Publik Badan Penghubung	1. Jumlah Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga Lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung	1. Melakukan kontak protokol dengan instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga Lainnya; 2. Menghadiri rapat-rapat keprotokolan dan teknis koordinasi dari Pemerintah Pusat/Lembaga lainnya; 3. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (Halal bihalal, buka puasa bersama).

	<p>2. Meningkatnya pelayanan pemerintah</p>	<p>2. Jumlah pelayanan pemerintahan</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan administrasi, informasi, keprotokolan, transportasi, sarana dan prasarana kepada pejabat / perangkat daerah / pimpinan dan anggota DPRD dan masyarakat dilakukan secara selektif dan memperhitungkan kemampuan daya dukung fasilitas yang ada;</p> <p>2. Meningkatkan Keindahan Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>3. Meningkatkan Promosi Wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>4. Meningkatkan Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Penyusunan Informasi Promosi;</p> <p>5. Meningkatkan Pelaksanaan Expo dan Forum Serumpun Sebalai</p>
--	---	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017-2022 maka Program Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta bagian dari program prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD. Program prioritas Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD termasuk ke dalam urusan : Non Urusan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari program di jabarkan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran;
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Kegiatan Pembelian Lahan Untuk Badan Penghubung di Jakarta;
8. Pembelian Lahan Untuk Asrama mahasiswa Bangka Belitung.

B. Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
3. Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;
4. Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan;
5. Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan;
6. Rehabilitasi berat anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini;
7. Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah;
9. Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai.

Tabel
Rencana Program / Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH		
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Terasilitasi Selama 12 Bulan	62 orang
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran Selama 12 Bulan	62 orang
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Disiplinnya	62 orang
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Meningkatkan Kualitas dan Kapasitasnya	35 orang
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah	3 Dokumen
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan
7	Pembelian Lahan Untuk Badan Penghubung di Jakarta	Luas Lahan Yang Di Beli Untuk Pembangunan Kantor Badan Penghubung Provinsi di Jakarta	0 m ²
8	Pembelian Lahan Untuk Badan Penghubung di Jakarta	Luas Lahan Yang Di Beli Untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bangka Belitung di Indralaya (Palembang), Bandung, Bogor	0 m ²

2. Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET
	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI, INVESTASI DAN PELAYANAN SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGHUBUNG PROVINSI		
1.	Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan	Jumlah Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-barang Kebudayaan Daerah	1 Set
2.	Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	4 Kali
3.	Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga	Jumlah Kegiatan Yang Terselenggara dalam Meningkatkan Peran hubungan Antar Lembaga	1 Kali
4.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	8 kali
5.	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta pimpinan Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Penyelenggaraan Keprkolan di Jabodetabek	20 kali
6.	Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Jumlah Anjungan yang diRehabitasi Berat	0 Anjungan
7.	Publikasi, Promosi dan Informasi Promosi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya video master promosi	1 paket
8.	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi	100%
9.	Kegiatan Expo dan Forum Seumpun Sebalai	Jumlah Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	1 Kali

Adapun matriks pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di lihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2017-2022, oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna mencapai target-target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah yang ada di dalam Rencana Strategis kepada masyarakat. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dan dalam menyusun Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta harus berpedoman pada RPJMD

Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2017-2022 ini adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi/kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh

komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 diharapkan mampu diimplementasikan secara optimal. Perwujudan Rencana Strategis untuk dapat menghasilkan apa yang diharapkan, perlu dilakukan kerjasama, keterpaduan dan keterbukaan dan etos kerja dari seluruh pegawai Badan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung.

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751231 200312 1 007